

# BUDAYA POLITIK DAN KWALITAS DEMOKRASI DALAM PILKADA 2015-2020

(Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pertama di Indonesia)

Wilda Rasaili

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Wiraraja Sumenep

Email: [rosailiw@yahoo.com](mailto:rosailiw@yahoo.com)

## **Abstract**

*Regional Head Election (Election) synchronously in 2015 was the first experience in the history of Indonesia elections, this experience indicates that Indonesia is one of the largest democracies lighthouse after the United Nation. The Quality of Democracy has to be seen the extent to which the political culture of society in the elections. The political culture is understood as a cognitive orientation, effective and evaluative in the political system or behavior sociopolitical to know the quality of democratic. Indonesia's political culture Is mixed political culture, a combination of political culture, Parochial, subjects and participants. In election of 2015 the public political attitude to be shown by the participation of choosing up to 70 percent with high indication, but the accusation reached 167 indicate the violations and irregularities showed the weakness of political society well. From that the quality of people's political culture is trapped in the number of voters are not the value and dignity of democracy, such as the menial of violation, freedom of choice is not money political reason, Intervention of government and electoral institutions.*

**Keywords: Politic Cultural, Democracy, Elections 2015.**

## **Abstraksi**

*Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak 2015 merupakan pengalaman pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia, pengalaman ini menandakan bahwa Indonesia termasuk salah satu mercusuar negara demokrasi terbesar setelah United Nation. Kualitas Demokrasi harus dilihat dari sejauh mana budaya politik masyarakat dalam pilkada. Budaya politik yang dimaknai sebagai orientasi kognitif, efektif dan evaluative terhadap system politik atau perilaku politik masyarakat menguji kualitas demokrasi. Budaya politik Indonesia Adalah mixed political culture, sebuah kombinasi dari budaya politik, parochial, kaula dan partisipan. Dalam pilkada serentak 2015 sikap politik masyarakat ditunjukkan dengan partisipasi memilih mencapai 70 persen dengan indikasi yang cukup tinggi, tetapi sisilain banyaknya gugatan yang mencapai 167 mengindikasikan banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang menunjukkan lemahnya political well masyarakat. Dari itu kualitas budaya politik masyarakat masih terjebak dalam angka-angka pemilih bukan nilai dan marwah demokrasi, berupa minimnya pelanggaran, kebebasan memilih bukan karena money politic, intervensi pemerintah maupun lembaga pemilu.*

**Kata Kunci : Budaya Politik, Demokrasi, Pilkada 2015.**

## **Pendahuluan**

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak menandakan bangsa Indonesia termasuk salah satu mercusuar negara demokrasi terbesar setelah Amerika Serikat, Prancis dan

negara-negara besar demokrasi lainnya.<sup>1</sup> Tingginya martabat demokrasi Indonesia didukung oleh budaya politik atau prilaku masyarakat dalam pilkada. Budaya atau prilaku masyarakat menentukan sejauhmana kualitas demokrasi bangsa ini.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak periode 2015 - 2020 menjadi pengalaman pertama sejak pemilihan umum dilaksanakan. System politik Indonesia telah menampilkan corak demokrasi langsung yang melibatkan seluruh masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada untuk membangun kemajuan daerah masing-masing sesuai keinginan mayoritas masyarakat dan peluang memanfaatkan system otonomi daerah. Pilkada yang baru saja berlangsung meliputi 261 daerah dengan rincian 9 provinsi, 219 kabupaten, dan 33 kota, dan di ikuti oleh 20 pasangan calon (paslon) tingkat provinsi, 644 paslon tingkat kabupaten dan 101 paslon tingkat kota dengan total 765 paslon.<sup>2</sup> Pilkada serentak menjadi bagian dari perkembangan budaya politik yang lebih efektif, efisien dan uji kualitas demokrasi bangsa.

Kwalitas demokrasi dalam Pilkada 2015 dapat dilihat dari netralitas pemerintah, tingginya partisipasi publik, peran partai politik, peran media massa dan budaya politik berupa prilaku masyarakat dalam politik baik dilakukan oleh tim maupun masyarakat sebagai pemilih langsung.<sup>3</sup> Pilkada tidak hanya dijadikan seremonial politik tetapi dapat berjalan langsung, bebas, jujur, rahasia dan bertanggung jawab. Pilkada sejatinya penjangkaran untuk menemukan pemimpin yang diinginkan oleh rakyat, kemenangan dalam pilkada adalah kemenangan rakyat, kuasa rakyat melahirkan pemimpin. Pilkada sebagai bukti *popular sovereignty*.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Parpol, media massa sebagai instrument Pilkada memfasilitasi terlaksananya pemilu yang demokratis dan berkualitas. KPU berfungsi untuk memaksimalkan komunikasi dan sosialisasi selain menjaga independensi, Parpol menjangkari calon pemimpin yang berkualitas dan menjaga etika untuk tidak melakukan pelanggaran seperti many politik, intervensi terhadap KPU dan Banwaslu. Kemudian media massa membantu menyambungkan kepentingan KPU, Parpol dengan masyarakat. Memaksimalkan peran fungsi instrument tersebut setidaknya menciptakan tingginya tingkat

---

<sup>1</sup> Ismatillah A Nu'ad Forum Demokrasi dan Pilkada Serentak , Institute for Social Research and Development., diakses dari <http://www.sinarharapan.co/news/read/151216023/forum-demokrasi-dan-pilkada-serentak> pada 15 januari 2016.

<sup>2</sup> Kpu, KPU provinsi dan KPU kabupaten Kota tetapkan pilkada 2015, diakses dari <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4186/KPU-Provinsi-dan-KPU-KabupatenKota-Tetapkan-Peserta-Pilkada-2015> , pada 20 Januari 2016.

<sup>3</sup> Nasional sindo, memalukan kualitas demokrasi indonesia jadi dibawah timor leste, diakses dari <http://nasional.sindonews.com/read/975074/12/memalukan-kualitas-demokrasi-indonesia-jadi-di-bawah-timor-leste-1426057570> , pada 20 Januari 2016.

partisipasi politik, dan kebebasan memilih. Larry Diamond memberikan isyarat dalam meningkatkan kualitas demokrasi<sup>4</sup> setidaknya memberikan kebebasan memilih, menyampaikan pendapatnya, keyakinannya, berkelompok, berbicara, transparansi dan pengawasan yang berkeadilan. Menciptakan kualitas demokrasi dalam Pilkada adalah memberikan kebebasan yang luas terhadap rakyat untuk memilih dan berpartisipasi dalam pilkada tanpa intervensi, diskriminasi dan manipulasi. *Money politic* sejatinya bukan bagian dari strategi pemenangan politik, tetapi kefatalan politik dan menghancurkan nilai-nilai demokrasi. Prilaku dan Pilihan demokrasi rakyat bukan ditentukan dengan money politic tetapi analisis politik secara mandiri dari rakyat yang berorientasi pada pembangunan politik yang lebih baik.

Dalam pada itu, budaya politik atau prilaku politik masyarakat dalam pilkada sebagai tolok ukur kualitas demokrasi dalam pengalaman pertama pemilu serentak di Indonesia. Tulisan ini akan menganalisa bagaimana prilaku politik masyarakat pada Pilkada serentak 2015-2020 dengan perspektif budaya politik yang kemudian menjadi tolak ukur kematangan demokrasi Indonesia. Kajian yang tidak spesifik terhadap suatu daerah dalam melihat budaya politik tidak menghasilkan sajian yang komprehensif tetapi analisis secara umum dalam pilkada yang diikuti oleh 261 daerah lebih representative melihat kualitas demokrasi Indonesia ditinjau dari budaya politik masyarakat dalam Pilkada Serentak.

## **Pembahasan**

### **Tinjauan Pustaka**

#### ***Budaya Politik Masyarakat.***

Budaya dalam konteks politik menyangkut dengan system politik yang dianut suatu negara beserta segala unsur (pola bersikap dan pola bertingkah laku) yang terdapat di dalamnya.<sup>5</sup> Sikap dan tingkah laku politik seseorang menjadi suatu objek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada seseorang dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang khas. Istilah politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak

---

<sup>4</sup> Larry Diamond, 2008. "Democratic Development and Economic, Development – Linkages and Policy Imperatives" yang disampaikan pada International IDEA Democracy Round Table in Partnership with CSDS, New Delhi, 17-18 Juni 2008.

<sup>5</sup> Sahya Anggara, 2013, "*Sistem Politik Indonesia*". Bandung: Pustaka setia, hal.109-110.

masyarakat terhadap kekuasaan dan pemerintah.<sup>6</sup> Tak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati masyarakat dalam lingkungan system politik. Almond dan Verba mendefinisikan bahwabudaya politik adalah orientasi kognitif, efektif dan evaluative terhadap system politik.<sup>7</sup>

Dalam penelitian budi Mulyana pada januari 2015, budaya politik Indonesia merupakan *mixed political culture*, sebuah kombinasi dari 3 (tiga) budaya politik: 1, budaya parochial 20 persen, berasal dari masyarakat miskin, pendidikan rendah, perpencil dan suku terasing; 2 budaya politik partisipan 16 persen, dari kalangan sarjana, mahasiswa, elit politik perkotaan dan elit desa; dan 3 budaya subyek, 60 persen dari kalangan kelas menengah perkotaan dan massa pedesaan.<sup>8</sup> Penelitian ini menguatkan konsep budaya politik campuran Almond dan Verba, mereka menyatakan bahwa kebudayaan politik suatu bangsa dalam kenyataannya meruakan budaya politik campuran. Tidak akan ditemukan dalam kenyataan empiric bahwa suatu bangsa hanya memiliki suatu jenis kebudayaan politik saja. Budaya politik campuran yang bersifat proporsional merupakan budaya demokratis yang dikenal dengan kewarganegaraan (*civic culture*).<sup>9</sup> Tidak ada suatu bangsa yang memiliki satu kebudayaan politik tertentu termasuk indonesia, karena latar belakang, ekonomi, pendidikan dan pandangan menjadi pembeda dalam corak budaya politik.

Dalam kebudayaan politik, golongan elit politik yang strategis dalam proses kekuasaan ataupun elit politik yang terlibat dalam proses politik: semisal Pilkada, biasanya menjadi objek pengamatan tingkah laku. Politisasi birokrasi dalam pemilu dan *black campaign* mengakibatkan pola perspektif negative terhadap elit politik dan apatisme dari luntarnya kepercayaan masyarakat.<sup>10</sup> Golongan elit politik acapkali memakai cara-cara yang tidak demokratis guna mempengaruhi masyarakat menuju kemenangan dalam pemilu, banyak pelanggaran mengakibatkan kemerosotan demokrasi baik dalam mekanisme pemilihan maupun dalam kebijakan dan kekuasaan.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> A. Rahman, 2007, "*Sistem Politik Inonesia*", Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 267-268.

<sup>7</sup> Almond dan Verba, 1984. Almond, Gabriel A.; Verba, Sidney (1984). Dalam edisi terjemahan, Sahat Simamora, "*Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*" Jakarta: Bina Aksara, hal. 16

<sup>8</sup> Budi Mulyana, 2015, "*Budaya Politik Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Politik*", Jurnal Aspirasi Vol. 5 No 2 februari 2015.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Muhammad labolo, 2006, hal.82.

<sup>11</sup> Adnan Buyung Nasotion, 2011. "*Demokrasi Konstitusional*", Jakarta: PT. Media Kompas Nusantara hal. 3-4

### ***Partisipasi Politik Masyarakat: Uji kesadaran Politik***

Partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, *pertama* masyarakat melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya pada saat pemilihan kepala daerah, *kedua* masyarakat terlibat dalam pemilihan berupa pengawasan dan pengawalan tetapi tidak memberikan hak pilihnya, hak pilih tidak diberikan karena dianggap tidak ada calon pemimpin yang cocok menurut dirinya. Charles Andrain dan James Smmith dalam bukunya *word value* Survey yang dikuti oleh Kacung Marijan, mengelompokkan tiga bentuk partisipasi. Partisipasi yang lebih pasif, yaitu dari keterlibatan politik seseorang, sejauh mana dia melihat dan memilih sebagai sesuatu yang penting, memiliki kepedulian, dan sering berdiskusi didalam kelompoknya. Kedua partisipasi yang lebih aktif, sejauh mana orang terlibat dalam kelompok, asosiasi atau tim untuk mendukung kemenangan dalam pemilihan. Ketiga partisipasi yang berupa protes, ikut menandatangani petisi, melakukan boikot termasuk golput yang beralasan rasional politik.<sup>12</sup>

Melihat partisipasi masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya menurut data KPU mencapai 70% secara nasional,<sup>13</sup> sebagai pengalaman pertaman angka 70% cukup tinggi, walaupun beberapa pakar politik menilainya rendah karena melihat sebagian daerah yang tidak mencapai angka 50%. Lembaga Surve dan Konsultan Politik / Polmark, menganggap partisipasi politik dalam pilkada serentak 2015 rendah seperti di kab. Jember dengan angka partisipasi pemilih 51.62 persen.<sup>14</sup> Sementara angka partisipasi pemilih secara rinci di beberapa daerah yang dibawah rata-rata 60 persen masih 34 daerah, partisipasi 60-70 persen terdapat 84 daerah, partisipasi 70-80 persen terdapat 88 daerah dan partisipasi diatas 80 persen ada 23 daerah. Adapaun daerah dengan partisipasi terendah adalah kota medan tingkat partisipasi 27 persen, dan tertinggi yaitu kabupaten Mamuja dan Kapubaten Nabire tingkat partisipasi 92 persen.<sup>15</sup> Secara nasional Angka partisipasi tidak jauh berbeda dengan pilkada

---

<sup>12</sup> Kacung Marijan, 2012, "*Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde baru*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 111.

<sup>13</sup> Kompas. "KPU. Partisipasi Pemilih pada Pilkada serentak mencapai 70 persen", diakses dari <<http://nasional.kompas.com/read/2015/12/29/06461231/KPU.Partisipasi.Pemilih>>, pada 22 Januari 2016.

<sup>14</sup> Nasional republika, "lembaga survei, partisipasi pemilih dalam pilkada serentak rendah", diakses dari <<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/12/11/nz74qx336-lembaga-survei-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-serentak-rendah>>, pada 22 januari 2016.

<sup>15</sup> metroTvnews, "Partisipasi pemilih dalam pilkada serentak baru 69 persen", diakses dari <http://news.metrotvnews.com/read/2015/12/18/202475/partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-seretak-baru-69-persen>, pada 22 Januari 2016.

sebelumnya, tetapi Pilkada serentak 2015 dapat menunjukkan efisiensi anggaran sekitar 1:5, walaupun dengan jangka waktu persiapan cukup pendek, tetapi dapat berjalan lancar dan efektif.<sup>16</sup> Jika pilkada serentak dipersiapkan dengan waktu yang cukup, selain efisiensi anggaran utamanya dimungkinkan dapat meningkatkan kesadaran politik dan tingginya partisipasi politik masyarakat.

Secara nasional tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada cukup tinggi, walaupun jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi dalam pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2014 terdapat penurunan sebesar 10-20%,<sup>17</sup> sementara pilkada 2015 merupakan pengalaman pertama dan persiapan waktu yang tidak banyak. Namun yang menjadi persoalan rendahnya partisipasi di berbagai daerah yang masih dibawah 50% seperti halnya di kota medan yang hanya tingkat partisipasinya 26%,<sup>18</sup> dan beberapa daerah lain yang tidak lebih 50%. Angka partisipasi yang rendah menunjukkan rendahnya budaya politik masyarakat yang meliputi lemahnya komunikasi politik, sosialisasi politik akhirnya berimplikasi pada tingkat partisipasi pemilih yang rendah.

Sementara ditinjau dari partisipasi masyarakat tetapi tidak menyalurkan pilihannya dalam pilkada tidak dapat diukur secara statistic, hal ini hanya dapat diasumsikan bahwa mereka menganggap pilkada merupakan momentum politik yang urgent dalam membangun politik dan demokrasi bangsa dengan menentukan pemimpin yang demokratis, visioner mampu membangun daerah lebih baik serta dapat memaksimalkan potensi daerah dibawah aturan otonomi daerah. Dengan persepsi yang tinggi dalam pilkada sehingga bagi masyarakat kecil yang tidak punya aksesibilitas membangun kekuatas politik pada akhirnya tidak melakukan pilihan politiknya ketika para calon kepala daerah dianggap tidak punya kualitas sebagaimana yang diharapkan. Bentuk partisipan dari masyarakat ini hanya berupa himbuan terhadap pemilih untuk memberikan pilihan sesuai hati nuraninya sementara dirinya tidak punya pilihan. Atau sebaliknya, seperti pemilih dikabupaten banyuwangi, banyuwangi memiliki prestasi daerah yang cukup tinggi bahkan ditingkat internasional sehingga menyaingi calon petahana (Anas-Yusuf) sangat berat bahkan hampir mustahil untuk

---

<sup>16</sup> Ibid, nasional Kompas.

<sup>17</sup> Suara, "partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak 2015 turun 20 persen", diakses dari <http://www.suara.com/news/2015/12/16/172444/partisipasi-masyarakat-dalam-pilkada-2015-turun-20-persen> pada 20 Januari 2016.

<sup>18</sup> Sinar harapan, "partisipasi masyarakat turun 20 persen" diakses dari <http://www.sinarharapan.co/news/read/151217176/-partisipasi-masyarakat-turun-20-persen> pada 20 Januari 2016.

mengalahkannya, termasuk juga di kota Surabaya calon petahan Risma-Wisnu, walaupun kemenangan di kabupaten banyuwangi dan Surabaya melebihi 80% dengan lawannya tetapi tingkat partisipasi pemilih tidak cukup tinggi hanya berkisar 60 persen, hal ini diasumsikan karena beberapa masyarakat menganggap siapapun lawannya calon petahana pasti menang.

Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikasi sejauhmana kesadaran politik masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula kesadaran politik dan kontribusinya membangun daerah. Secara statistic bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam memilih dapat menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin baik, masyarakat terlibat langsung menentukan pemimpin daerahnya, keterlibatan ini sebagai bangunan demokrasi.

### ***Prilaku Politik, Demokrasi dan Pilkada 2015-2020.***

Pilkada merupakan perwujudan demokrasi yang tampak. Dalam pilkada dapat terlihat lebih jelas bagaimana bentuk prilaku politik masyarakat, kebebasan memilih, kebebasan berfikir, kecerdasan politik, independensi pemerintah, keterlibatan partai politik, media massa dan system politik baik skala nasional maupun lokal. Sehingga dari indicator-indikator tersebut dapat dilihat kualitas demokrasi bangsa terutama dalam pilkada. Pemilu menjadi persta politik rakyat karena kekuasaan sepenuhnya berada ditangan rakyat, rakyat dapat menentukan pemimpin sesuai dengan keinginan dan harapan yang diberikan oleh calon kepala daerah. Calon kepala daerah dari petahana yang telah membuktikan dirinya membangun daerah lebih baik, bekerja keras memiliki akuntabilitas yang tinggi maka rakyat dengan mudah memberikan pilihannya dari pada calon lain yang masih memberikan harapan, sebaliknya petahan yang tidak membawa keberhasilan maka akan dihukum dengan tidak memilihnya dalam pilkada.

Dalam pilkada serentak 2015-2020 calon petahana cukup tangguh untuk dikalahkan, dari 167 calon petahana yang masing-masing terdiri dari 12 gubernur, 29 wali kota, 126 bupati. Sebanyak 146 petahana maju kembali dalam pemilihan di daerah yang sama saat menjabat, sedangkan 21 petahan memilih berkompetisi di daerah lain.<sup>19</sup> Dari semua jumlah calon petahana sebanyak 70 persen memenangkan pilkada serentak 2015.<sup>20</sup> Kemenangan

---

<sup>19</sup> Nasional kompas, “sebanyak 167 calon di Pilkada serentak merupakan petahana” diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/08/04/03132181/Sebanyak.167.Calon.di.Pilkada.Serentak.Merupakan.Petahana> pada 22 Januari 2015.

<sup>20</sup> Suara, “LSI, 70 persen petahana menang dalam pilkada serentak”, diakses dari <http://www.suara.com/news/2015/12/10/161341/lsi-70-persen-petahana-menang-dalam-pilkada-serentak> pada 28 Januari 2016.

calon petahana tidak semata mata menjustifikasi bahwa calon petaha lebih baik dan bertanggung jawab dalam memimpin, ada beberapa parameter yang perlu dijadikan pisau analisis setidaknya melihat bagaimana proses pilkada sisuatu daerah berlangsung semisal; kebebasan memilih, independensi pemerintah, kecerdasan masyarakat menjadi factor penentu. Jika indikator-indikator tersebut lemah maka dapat dipastikan calon petahan menang, tetapi sebaliknya jika kebebasan memilih tinggi, many politik rendah, independensi pemerintah tinggi, kecerdasan masyarakat tinggi, sosialisasi politik tinggi, maka calon lain yang memiliki akuntabilitas, kapabislitis punya potensi untuk menang.



Sumber: Sekali Survei Indonesia SSI.<sup>21</sup>

Melihat kewalitas demokrasi dalam pilkada tidak hanya diukur dengan statistic seberapa banyak rakyat pergi ke TPS. Kwalitas demokrasi harus pula didasari budaya politik yang terbangun sebelum pilkada, saat pilkada berlangsung dan pasca pilkada. Proses dalam pilkada tersebut setidaknya meliputi pula *independency, freedom and political well*. Analisis dalam proses dan landasanya dalam berpartisipasi sebagai parameter sejauhmana kwalitas demokrasi berlangsung dalam pilkada 2015. Demokrasi sebagaimana di gambarkan oleh Nurcholis Madjid adalah kesadaran politik masyarakat untuk menerima secara positif adanya perbedaan orientasi politik yang juga berarti harus tersedia ruang bagi kegiatan oposisi. Demokrasi membangun sikap saling percaya *mutual trust* dan saling menghargai *mutual*

<sup>21</sup>Skala survei, "jumlah calon petahana pilkada 2015 dan proporsi menang-kalah", diakses dari <<http://skalasurvei.com/jumlah-calon-petahana-pilkada-2015-dan-proporsi-menang-kalah/>> pada 28 Januari 2016.



*respect*) antara sesama warga masyarakat.<sup>22</sup> *trust and respect* menjadi ukuran penting dalam proses pilkada, bagaimana calon kepala daerah beserta tim dan pendukungnya harus mampu membangun ikatan kepercayaan dengan lawannya, tidak saling serang, intimidasi *black campaign* dan lebih banyak politik yang merusak terhadap orientasi pilihan politik masyarakat. Selain itu pasca pilkada menjadi catatan bahwa proses pilkada berjalan demokratis, dalam artian pihak yang menang dapat memberikan ruang oposisi, bagaimana pemimpin tidak terjebak pada oligarki, totaliter dan kepentingan oportunisme, tidak adanya yang namanya bersih-bersih pegawai birokrasi karena pemimpin baru serta tidak ada pergeseran posisi karena dianggap tidak mendukung. Selain itu tidak ada sekengketanya berkelanjutan pasca putusan KPU atau MK pada hasil pilkada.

Perspektif di atas tolok ukurnya adalah rendahnya tingkat konflik dalam pilkada. Dalam pilkada 2015 yang diikuti oleh 261 daerah sebanyak 144 pasangan calon kepala daerah diberbagai tingkatan mengajukan gugatan kepada MK.<sup>23</sup> Sebagian besar gugatan itu ditolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (a) dan (b) UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015.<sup>24</sup> Dari data *Setara Institute for Democracy and Peace* bahwa dari 144 pasangan calon yang menggugat hanya 21 gugatan yang diterima dan diperiksa oleh MK.<sup>25</sup> Sementara hanya 7 perkara yang diterima dan langsung disidangkan pokok perkara diantaranya calon Bupati Mamberami Raya, calon Bupati Teluk Bintuni, calon Bupati Bangka Barat, calon Bupati Muna, calon bupati Kuantan Singingi, calon bupati

---

<sup>22</sup> Nurcholis Madjid, 2004, "*Indonesia Kita*", Jakarta: Universitas Paramadina, p. 97-98.

<sup>23</sup> Mahkamah konstitusi, diakses di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12629#.Vr14TU9q3IU>, pada 20 Januari 2016

<sup>24</sup> Undang-undang pembatasan dikabulkannya gugatan ke MK juga menunjukkan kualitas demokrasi yang rendah dan memicu munculnya konflik dan kecurangan yang semakin besar. Dengan adanya pembatasan itu MK akan tutup mata dan telinga terhadap pasangan calon kepala daerah yang menggugat hasil pilkada walaupun telah membawa sejuta bahkan sebanyak mungkin bukti-bukti dan saksi atas kecurangan dan pelanggaran baik yang dilaksanakan pasangan calon maupun KPU. Bahkan ketua MK tahun 2008-2013 mengatakan selain undang-undang itu tidak demokratis berpotensi memicu kecurangan yang semakin besar, di pilkada selanjutnya calon akan berfikir untuk membuat kecurangan yang banyak dan besar sehingga tidak bisa hasilnya tidak dapat disengketakan. Moh. Mahfud MD, 2016 "Politik Hukum Pasca Reformasi". Makalah diseminarkan di Universitas Wiraraja Sumenp, 17 Pebruari 2016.

<sup>25</sup> Mahkamah konstitusi, "ratusan Gugatan berpotensi tak diproses", diakses dari [www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.berita&id=12642#.VsiDmdA-Ywg](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.berita&id=12642#.VsiDmdA-Ywg) pada 20 Januari 2016.

Kepulauan Sula dan calon bupati Solok Selatan.<sup>26</sup> Dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dan atau ahli pemohon, termohon, pihak terkait dan pemberi keterangan.

Terlepas dari kepentingan politik, banyaknya gugatan yang dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup, maka ini mengindikasikan bahwa pilkada serentak masih memunculkan banyak persoalan baik kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon maupun independensi dari KPU dan Panwaslu. Banyaknya kasus *money politic* sebagai salah satu factor bahwa kualitas demokrasi dalam pilkada masih lemah. *Political well* dalam budaya politik masyarakat untuk mendorong kualitas demokrasi masih lemah, pilihan politik masyarakat bukan berdasarkan kualitas pemimpin tetapi dorongan uang dan intervensi elit bukan pendidikan politik elit. Sikap calon kepala daerah yang perkaranya ditolak oleh MK juga mengindikasikan kualitas demokras, sikap kooperatif dari calon dan timnya menunjukkan bahwa mereka memahami aturan yang harus dipatuhi serta mekanisme politik yang harus diikuti. Yang kalah bukan berarti berteriak melawan tetapi mendukung calon yang menang untuk pembanguna daerah lebih baik.

## Penutup

Budaya politik sebagai salah satu sikap, prilaku atau orientasi kognitif, efektif dan evaluate terhadap system politik menjadi indicator dan tolak ukur melihat sejauh mana budaya politik terjadi serta bagaimana kualitas demokrasi berjalan dalam ini pada pilkada serentak 2015-2020. Dalam realitasnya tidak ada budaya politik yang dominan dalam satu negara, antara parochial, kaula dan partisipan. Di Indonesia lebih kepada budaya *mixed political culture*, sebuah kombinasi dari ketiga budaya politik. Prilaku politik dalam pilkada yang kemudia sebagai tolak ukur kualitas demokrasi dalam pengalaman pemilu serentak pertamakali tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, secara nasional mencapai angka 70 persen. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada menunjukkan tingginya kesadaran politik yang dimiliki, masyarakat terlibat dalam menentukan pemimpin untuk membawaa kesejahteraanny. Tingginya tingkat partisipas sayangnya tidak berbanding lurus dengan proses berlangsungnya pilkada. Banyaknya pengajuan gugatan kepada MK mengindikasikan bahwa terdapat proses politik dalam pilkada yang tidak beres, adil, procedural dan jujur sebagai dasar pemilu. Walaupun tidak menimbulkan konflik antar masyarakat maupun masyarakat dengan lembaga penyelenggara karena ketatnya aturan di MK dan kuatnya power KPU tetapi ini menunjukkan bahwa

---

<sup>26</sup> Nasional tempo, MK hanya terima tujuh gugatan sengketa pilkada 2015“, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/26/063739564/mk-hanya-terima-tujuh-gugatan-sengketa-pilkada-2015> pada 28 Januari 2016.

demokrasi tidak hanya dapat dilalui dengan tingkat partisipasi yang tinggi tetapi juga harus dilihat dari minimnya tingkat kecurangan dan pelanggaran baik dari pasangan calon maupun penyelenggara pemilu. Sebagai pengalaman pertama pilkada serentak, efisiensi anggaran, minimnya konflik menjaga catatan apresiatif, tetapi kualitas pemilih dengan mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran dan money politik menjadi lebih penting dalam menjaga marwah berdemokrasi.

## Daftar Pustaka

- A. Rahman, 2007, *“Sistem Politik Indonesia”*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adnan Buyung Nasotion, 2011. *“Demokrasi Konstitusional”*, Jakarta: PT. Media Kompas Nusantara hal.
- Almond dan Verba, 1984. Almond, Gabriel A.; Verba, Sidney (1984). Dalam edisi terjemahan, Sahat Simamora, *“Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara”* Jakarta: Bina Aksara.
- Budi Mulyana, 2015, *“Budaya Politik Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Politik”*, Jurnal Aspirasi Vol. 5 No 2 februari 2015.
- Ismatillah A Nu’ad, Forum Demokrasi dan Pilkada Serentak, Institute for Social Research and Development, diakses dari <http://www.sinarharapan.co/news/read/151216023/forum-demokrasi-dan-pilkada-serentak-pada-15-januari-2016>
- Kacung Marijan, 2012, *“Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde baru”* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Larry Diamond, 2008. “Democratic Development and Economic, Development – Linkages and Policy Imperatives” yang disampaikan pada International IDEA Democracy Round Table in Partnership with CSDS, New Delhi, 17-18 Juni 2008.
- Moh. Mahfud MD, 2016 “Politik Hukum Pasca Reformasi”. Makalah diseminarkan di Universitas Wiraraja Sumenp, 17 Pebruari 2016.
- Nurcholis Madjid, 2004, *“Indonesia Kita”*, Jakarta: Universitas Paramadina.
- Sahya Anggara, 2013, *“Sistem Politik Indonesia”*. Bandung: Pustaka setia
- Kompas. “KPU. Partisipasi Pemilih pada Pilkada serentak mencapai 70 persen”, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/29/06461231/KPU.Partisipasi.Pemilih.pada.Pilkada.Serentak.Mencapai.70.persen> pada 22 Januari 2016.
- Kpu, KPU provinsi dan KPU kabupaten Kota tetapkan pilkada 2015, dari [www.kpu.go.id/index.php./post/read/2015/4186/KPU-Provinsi-dan-KPU-KabupatenKota-Tetapkan-Peserta-Pilkada-2015](http://www.kpu.go.id/index.php./post/read/2015/4186/KPU-Provinsi-dan-KPU-KabupatenKota-Tetapkan-Peserta-Pilkada-2015)>, diakses pada 20 Januari 2016.
- Mahkamah konstitusi, “ratusan Gugatan berpotensi tak diproses”, dapat dilihat di [www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.berita&id=12642#.VsiDmdA-Ywg](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.berita&id=12642#.VsiDmdA-Ywg)>, diakses pada 20 Januari 2016.
- Mahkamah konstitusi, dapat dilihat di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12629#.Vr14TU9q3IU>>, diakses pada 20 januari 2016

metroTvnews, “Partisipasi pemilih dalam pilkada serentak baru 69 persen”, diakses di <<http://news.metrotvnews.com/read/2015/12/18/202475/partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-serentak-baru-69-persen>>, pada 22 Januari 2016.

Nasional republika, “lembaga survei, partisipasi pemilih dalam pilkada serentak rendah”, diakses dari <<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/12/11/nz74qx336-lembaga-survei-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-serentak-rendah>>, pada 22 Januari 2016.

Nasional kompas, “sebanyak 167 calon di Pilkada serentak merupakan petahana” diakses dari <<http://nasional.kompas.com/read/2015/08/04/03132181/Sebanyak.167.Calon.di.Pilkada.Serentak.Merupakan.Petahana>>, pada 22 Januari 2015.

Nasional sindo, memalukan kualitas demokrasi indonesia jadi dibawah timor leste, dapat dilihat di <<http://nasional.sindonews.com/read/975074/12/memalukan-kualitas-demokrasi-indonesia-jadi-di-bawah-timor-leste-1426057570>>, diakses pada 20 Januari 2016

Nasional tempo, MK hanya terima tujuh gugatan sengketa pilkada 2015“, diakses di <<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/26/063739564/mk-hanya-terima-tujuh-gugatan-sengketa-pilkada-2015>>, pada 28 Januari 2016.

Sinar harapan, “partisipasi masyarakat turun 20 persen” diakses di <<http://www.sinarharapan.co/news/read/151217176/-partisipasi-masyarakat-turun-20-persen>>, pada 20 Januari 2016.

Skala survei, “jumlah calon petahana pilkada 2015 dan proporsi menang-kalah”, diakses di <<http://skalasurevei.com/jumlah-calon-petahana-pilkada-2015-dan-proporsi-menang-kalah/>>, pada 28 Januari 2016

Suara, “LSI, 70 persen petahana menang dalam pilkada serentak”, diakses di <<http://www.suara.com/news/2015/12/10/161341/lsi-70-persen-petahana-menang-dalam-pilkada-serentak>>, pada 28 Januari 20016.

Suara, “partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak 2015 turun 20 persen”, <<http://www.suara.com/news/2015/12/16/172444/partisipasi-masyarakat-dalam-pilkada-2015-turun-20-persen>>, pada 20 Januari 2016.